

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TIM PROMOTOR	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENILAI DAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA AKHIR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK, GAMBAR, DAN BAGAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
GLOSARIUM	xviii
ABSTRACT	xxiii
INTISARI	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
1. Indikasi Penyimpangan Implementasi Kebijakan Penyiaran Televisi	2
2. Problem Teoretis	11
B. Pertanyaan Penelitian	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Justifikasi dan Signifikansi Penelitian	17
F. Keaslian Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	21
A. Tinjauan Pustaka	22
1. Perspektif dan Pengertian Kebijakan Penyiaran Televisi	22
2. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan	29
3. Karakteristik Kebijakan Penyiaran Televisi	33
4. Persoalan Implementasi Kebijakan	41
5. Faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan: Konten dan Konteks	45
6. Konteks Pasca-Reformasi dan Negara Berkembang	51
B. Kerangka Teori	56
1. <i>Top-down</i> “Baru”: Alternatif Pendekatan Implementasi Kebijakan	56
2. Penilaian Implementasi Kebijakan	60

3. Kepentingan dan Peran Implementor dalam Tinjauan Teori <i>Principal-Agent</i>	66
4. Kepentingan, Peran Aktor-Aktor di Luar Negara, dan Tindakan Politik Agen.....	74
C. Model Penelitian.....	84
D. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi	89
1. (Penyimpangan) Implementasi Kebijakan Penyiaran Televisi	89
2. Kejelasan UU Penyiaran	90
3. Kepentingan Aktor Negara (Agen).....	91
4. Kepentingan Aktor di Luar Negara.....	92
BAB III METODE PENELITIAN	93
A. Paradigma Penelitian	93
B. Metode Pengumpulan Data	95
C. Operasionalisasi Teknik Pengumpulan Data	96
1. Penyimpangan dalam Implementasi Kebijakan	96
2. Kejelasan Undang-Undang Penyiaran.....	100
3. Pengaruh Kepentingan Agen dan Aktor di Luar Negara	100
D. Lokasi Penelitian	106
E. Periode Waktu Penelitian	107
F. Prosedur Analisis Data	107
G. Sistematika Pembagian Bab.....	109
BAB IV IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPEMILIKAN, PENYELENGGARAAN PENYIARAN JARINGAN, DAN PERIZINAN: MENJAGA KEMAPANAN.....	111
A. Rangkaian Peraturan Lepemilikan, Penyiaran Jaringan, dan Perizinan	111
B. Subtansi Kebijakan.....	117
1. Kepemilikan Lembaga Penyiaran: Hak Istimewa bagi LPS-Jakarta.....	117
2. Penyiaran Jaringan: Pengabaian dan Diskriminasi LPS-lokal	125
3. Perizinan: Kembalinya Kewenangan di Tangan Pemerintah Pusat.....	136
C. Praktik Kebijakan	147
1. Kepemilikan Terkonsentrasi	147
2. Penyiaran Jaringan: Penyiaran “Anak Cabang TV Jakarta”.....	160
3. Pemusatan Perizinan: Daerah Dapat Apa?	167
D. Respon Publik.....	175
E. Rangkuman Bab IV	181
BAB V IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ISI SIARAN: JAKARTA <i>PRIME TIME</i> , LOKAL DI “JAM HANTU”	187
A. Rangkaian Peraturan: Isi Siaran, Mandat bagi KPI.....	188

B. Substansi Kebijakan	190
1. Keragaman <i>Outlet</i> : Pengerdilan Stasiun Penyiaran Lokal-Independen.....	192
2. Keragaman Program: Konten Bukan Saja tentang Hiburan	196
3. Keragaman Sudut Pandang: Pelayanan Publik Bukan Golongan Tertentu	197
4. Keragaman/Muatan Lokal: Dari, Oleh, dan Untuk Masyarakat Lokal.....	200
C. Praktik Kebijakan	206
1. Penguasaan <i>Outlet</i> oleh Stasiun Jaringan/Stasiun Relai TV-Jakarta.....	206
2. Keseragaman Program: Hiburan Mania dan “Jakarta Banget”	212
3. Sudut Pandang Pemilik/Golongan	223
4. Keragaman/Muatan Lokal: Hadir Sekedarnya	225
D. Respon Publik.....	239
E. Rangkuman Bab V.....	250
BAB VI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TELEVISI DIGITAL: MENGUATNYA OTORITAS PEMERINTAH DAN KOOPERASI KAPITAL	259
A. Rangkaian Peraturan Televisi Digital: Dominasi Keputusan Menteri	260
B. Substansi Kebijakan	261
1. Pembuatan Aturan Melampaui Mandat Kebijakan.....	261
2. Peniadaan Peran KPI dalam Mengatur TV Digital.....	271
3. Munculnya Bidang Usaha Baru dan Interdependensi Penyelenggara Penyiaran	276
4. Kelonggaran Aturan Kepemilikan	281
5. Pengaburan Aturan tentang Jumlah Saluran dan Jangkauan Siaran.....	285
6. Biaya Penyelenggaraan Penyiaran Berlipat.....	288
7. Kontradiksi antara Undang-Undang Penyiaran dan Aturan di Bawahnya	290
C. Praktik Kebijakan	297
1. Persyaratan dan Keputusan Berbeda.....	298
2. Kanal Digital untuk Swasta	300
3. Hak Pengelolaan Multipleksing Berada di Tangan LPS Bermodal Kuat	303
4. Penundaan Pengumuman	306
5. Pembatalan Aturan dan Moratorium	306
6. Aturan yang Sudah Dicabut Digunakan sebagai Landasan Hukum.....	309
D. Respon Publik.....	311
E. Rangkuman Bab VI.....	315
BAB VII FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH: INTERVENSI KAPITAL DAN INTERKONEKSI KEPENTINGAN.....	322
A. Ketidakjelasan Kebijakan: Pelung bagi Agen Bertindak Bebas	323

1.Ketiadaan Pembatasan Kepemilikan dan Aturan <i>Holding Company</i>	323
2.Berjaringan dengan TV Lokal ataukah dengan “Anak Cabang”?	325
3.Ambiguitas Status Pemodal Lokal.....	326
4.Kekacauan Batas Kewenangan Pemerintah dan KPI.....	328
5.Porsi Kandungan Isi Siaran.....	331
6.Penyelenggaraan TV Digital, Tindakan di Luar Mandat	332
B. Peta Aktor dan Konteks	333
C. Kepentingan Aktor-Aktor Negara	342
1.Kepentingan DPR.....	342
2.Kepentingan Pemerintah.....	349
3.Kepentingan KPI	364
C. Kepentingan Aktor-Aktor di Luar Negara	373
1.Kepentingan LPS-Jakarta: Mengamankan Bisnis	373
2.Kepentingan LPS-lokal: Mengembangkan Stasiun Penyiaran Lokal	376
3.Kepentingan Masyarakat Sipil: Menegakkan Penyiaran Demokratis dan Desentralistis	378
D. Relasi Antaraktor.....	379
1.Kubu-Kubu Aktor	379
2.Relasi Antaraktor: Kasus Keputusan JR 2003 dan Respon Pemerintah	381
3.Relasi Antaraktor: Kasus Digitalisasi Penyiaran	393
4.Relasi Antaraktor: Kasus Pemilihan KPI.....	403
E. Faktor Utama: Intervensi Kapital dan Interkoneksi Kepentingan.....	405
F. Model Intervensi Kelompok Kapitalis	416
G. Rangkuman Bab VII	421
BAB VIII PENUTUP	425
A. Diskusi Temuan.....	425
B. Kesimpulan.....	433
C. Implikasi	440
D. Keterbatasan Penelitian	443
E. Rekomendasi	444
DAFTAR PUSTAKA.....	445
Lampiran-lampiran	468